

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan
Hutan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
Peraturan Presiden No.16 tahun 2015 jo Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2020
tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.
Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.
Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa
Keuangan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana
Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-689/E/EJP/12/2004
tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TPPU
United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And
Psychotropic Substances, 1988.
Laws of Malaysia Act 631 Anti-Money Laundering, AntiTerrorism Financing
and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU XII/2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XIII/2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 74/PUU-XVI/2018.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XIX/2021.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47/PUU-XXI/2023.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Putusan PN Sorong Nomor: 145/PID.B/2013/PN.Srg.
Putusan PN Jayapura Nomor: 15/Pid/2014/PT.JPR
Putusan PN Batam Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm.

Putusan PN Surabaya Nomor:53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby.
Putusan PN Pekanbaru Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr.
Putusan PN Denpasar Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps.
Putusan PN Palembang Nomor: 1010/Pid.B/LH/2019/PN PLG
Putusan PN Manokwari Nomor: 179/Pid.B/LH/2022/PN Mnk

C. Buku

- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam (Jakarta: Pradnya Paramita,1996)
- Campbell Black, Henry. *Black Law Dictionary*, (St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991).
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*,” (Malang:Bayumedia Publishing, 2005).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System, a Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975)
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi ke 2, J (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Hiariej, Eddy. O. S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. (Bandung: Books Terrace&Library. 2007).
- HS, H. Salim dan Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017).
- Istanto , F. Sugeng. *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Ganda. 2007).
- Martosowignjo, Sri Soemantri. *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*,(Bandung: Alumni, 1887).
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*,(Jakarta:Prenadamedia Group, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,1999)
- _____. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti:1993)
- _____. *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2004).

- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016).
- PPATK. *Memorie Van Toelichting Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Buku Kesatu*. (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit)
- _____. *Memorie Van Toelichting Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Buku Kedua*. (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Siahaan, Maruarar. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,Cet. 5 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Sugiharto,R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 1986)
- Syamsyudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2007).
- Syahrijal Syakur. *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan Oleh Penyidik Lain*, (Jakarta: PPATK, 2021)
- The Network of National Experts on Joint Investigation Teams. *Joint Investigation Teams Practical Guidance*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021).

D. Artikel Jurnal

- Council of Europe European Commision. “Project: Development of Reliable and Functioning Policing Systems and Enhancing of Combating Main Criminal Activities and Police Co-Operation (CARPO), Financial Investigations and Confiscation of Proceeds From Crime.” CARDS Regional Programme 2002/2003, hlm 29. Diakses melalui <https://rm.coe.int/16806ef391> pada 18 Oktober 2023
- Danindra, Praditia. “Perampasan Dan Pengembalian Barang Bukti Alat Angkut Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Pengadilan Negeri Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)”, *Jurnal Dinamika Hukum* ,Vol. 10 No. 2, Mei 2010, hlm 4. Diakses melalui <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/145/169>
- Dittmar, Herbert, “Archimedes Operation and The Destruction of The Brazilian

- Amazon Forest With The State Consent”, *Recima 21 – Revista Cientifica Multidisciplinar*, Vol.3, No. 3, hlm 1-22. Diakses melalui <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1260/977>
- Feller, S.Z. “Significance of the Requirement of Double Criminality in the Law of Extradition”, *Israel Law Review* Vol. 10, (November 1975).
- Hairi, Prianter Jaya. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS Dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum”. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, (November 2021).
- Herlix, Tomy. (2019). *Relevansi Asas Ne Bis In Idem Dengan Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Asalnya*. (Jenis apa, SKRIPSI, TESIS, atau DISERTASI), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Imbar, Maggie Regina, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No. 1, Januari – Maret 2015, hlm 4. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3223-ID-peran-jaksa-terhadap-asset-recovery-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>
- Ismail, Yudhia dan Achmad Rizki Sa’roni. “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal Menurut UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Merdeka Pasuruan*, Vol. 3, No. 1, (Desember 2020).
- Maizaroh, Muthi’ah, Muh. Fikran Sena, dan Khulaifi Hamdani. “Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021,” *aml/cft journal*, Vol.01 No.01, (Desember 2022).
- Mastur dan Woro Winandi. “Kewenangan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi,” *Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 2, (Agustus 2022).
- Nurhadiyanto, Lucky. “Alur Pelacakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Melalui Pendekatan Pencucian Uang,” *Jurnal Kriminologi Sisi Lain Realita*, Vol.1, No. 2, (November 2016).
- Pamungkas, Haryono Budhi, “Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan”, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2012. Diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20307914-T31127->

Pelaksanaan%20penghentian.pdf, pada 20 Oktober 2023.

- Prawira, T. S. (2022). “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri”, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 5
- Putrie, Irene. “Asset Tracing and Asset Recovery dalam TPK dan TPPU. Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm 8. Diakses melalui https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/01-Asset-Recovery-Irene-Putrie.pdf. Pada 20 Oktober 2023.
- Richardson, Ian and Ignacio de Lucas Martín, “Partnership for Good Governance II Project on “Strengthening measures to counter money laundering and financing of terrorism in Ukraine” Technical Paper Handbook on money laundering identification, investigation and prosecution for Ukraine, Council of Europe Experts, Juni 2021.
- Sihotang, Lesson dan Elsa Marlina Simalango. “Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”. *Jurnal Visi Sosial Humaniora (VSH)*, Volume: 02, No 01 Juni 2021, hlm. 68-85. Diakses melalui <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/download/365/463/5360> pada 20 Oktober 2023.
- Syakur M, Kukun Abdul. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol.3 No.2, hlm. 222. Diakses melalui <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/420> pada 18 Mei 2023.
- The Challenges Presented by Parallel Investigation, *Chicago Daily Law Bulletin*, Vol. 160, No. 4.
- Yuharfiandri dan Nur Hikmah Damayanti Sunawir. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau Dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Parallel Investigation Approach*.” *Padjajaran Law Review*. Vol.10 No.2 (Desember 2022).
- Yanuar, Muh. Afdal. “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.4,(Desember 2019).
- Yasin, Akhmad. “Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara. Diakses melalui
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1621/pdf/270>
5 pada 23 November 2023.0 pada 12 November 2023.

E. Laporan

APG, APG Yearly Typologies Report 2017: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing. Diakses melalui <http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.aspx?d=41f45467-8303-4b70-8791-038e5d4925f8> pada 2 Juni 2023.

Direktorat Hukum PPATK, “Kajian Hukum, Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Penguatan Kelembagaan PPATK Melalui Penambahan Fungsi Penyidikan Kepada PPATK Dalam Rangka Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” (Jakarta:PPATK, 2017)

Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan PPATK, “Ancaman dan Kerentanan Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Tahun 2017 Eksternal Terbatas.” (Jakarta: PPATK.2017).

Gakkum KLHK, “Kumpulan Peraturan : Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, (Jakarta:Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

MONEYVAL Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime. “Committee Of Experts On The Evaluation Of Anti-Money Laundering Measures And The Financing Of Terrorism”, 2015. Diakses <https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-anti-money-laundering-measures/1680715106> pada 2 Juni 2023.

PPATK. “Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Edisi Desember 2021,” (Jakarta: PPATK. 2021).

_____. “Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Edisi Maret 2023,” (Jakarta: PPATK. 2023).

_____. “Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Upaya Pengoptimalisasiannya.” (Jakarta: Direktorat Hukum PPATK, 2021),

Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU Tahun 2021. “Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021.” (Jakarta: PPATK. 2021).

- Tim Riset PPATK dan Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”, (Jakarta: PPATK. 2018)
- Tim Riset PPATK dan Bareskrim Polri. “Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan,” (Jakarta: PPATK. 2020).
- Tim Riset PPATK, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019 dalam Laporan Hasil Riset Tahun 2020,” (Jakarta: PPATK. 2020).
- Laporan Tahunan PPATK 2022. Budaya Indonesia Mendunia Menyambut Keanggotaan FATF.” (Jakarta: PPATK. 2022).

F. Internet

- Balai Permasalahatan Kelas I Jakarta Selatan. Glossary Index “Aparat Penegak Hukum”. 2021. Diakses melalui <https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/aparat-penegak-hukum/> pada 10 November 2023.
- Camdessus, Michel. “International Monetary Fund. “Money Laundering: the Importance of International Countermeasures”, International Monetary Fund, 1998. Diakses melalui <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp021098> pada 1 Juni 2023.
- Dirjen Gakkum KLHK. “Gakkum KLHK Menggandeng Kejaksaan Agung untuk Mendukung Penanganan Kasus Pencucian Uang”, 2023. Diakses melalui <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/690>. pada 8 November 2023.
- _____. “Laporan Kinerja 2022 Dirjen Gakkum KLHK”, hlm 17. Diakses melalui https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_PHPLHK_Tahun_2022.pdf, pada 21 November 2023.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar Chandra, “Mengurangi Inpmentasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia”, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015).
- Emirzon, H. Joni. “Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang.” 2017. Diakses melalui https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf pada 27 Mei 2023.
- FATF. “Laporan FATF Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Juni 2020, hlm 43. Diakses melalui <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/reports/Indonesian-Money-Laundering-and-the-Illegal-Wildlife-Trade.pdf> pada 11 November 2023.

- _____. "Money Laundering from Environmental Crime," Juli 2021, hlm 49.
Diakses _____ melalui
https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/Publications/2021/indonesia/FATF_Money-Laundering-from-Environmental-Crime_IND.pdf pada 12 November 2023.
- Gakkum KLHK. "Statistik Kinerja Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum."
Diakses melalui <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>, pada 2
Desember 2023.
- Grup Penanganan APU PPT OJK. "Panduan Penerapan Program APU PPT
Berbasis Risiko terkait TPA Lingkungan Hidup." OJK. Diakses melalui
[https://www.ojk.go.id/apu-
ppt/id/informasi/materi/Documents/Panduan%20Penerapan%20Program
%20APUPPT%20Berbasis%20Risiko%20terkait%20TP%20Kehutanana_
pdf](https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/Panduan%20Penerapan%20Program%20APUPPT%20Berbasis%20Risiko%20terkait%20TP%20Kehutanana.pdf) pada 12 Maret 2023.
- Ibrahim, Lina M. dan Sitompul, Zulkarnain, "Upaya Penegakan Hukum Atas
Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Hasil Tindak Pidana Insider Trading
Di Pasar Modal Indonesia", Thesis Universitas Indonesia Library, 2015.
Diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/detail?id=111517&lokasi=lokal> pada
29 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti Keadilan. Diakses Melalui
[Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/KEADILAN](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KEADILAN) Pada 11 Agustus 2023.
- Kbp Jamaludin, "Penyidikan Tppu Tindak Pidana Kehutanana", Dittipideksus
Bareskrim Polri, disampaikan pada FGD Peran PJK dalam pencegahan
TPPU melalui pendalaman TP Kehutanana sebagai Tindak Pidana Asal
TPPU beresiko tinggi via Virtual Platform, hlm Diakses melalui
[Https://Ojk.Go.Id/Apu-
Ppt/Id/Informasi/Materi/Documents/Bareskrim%20-
%20penyidikan%20tppu%20kehutanana.Pdf](https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/Bareskrim%20-%20penyidikan%20tppu%20kehutanana.pdf) pada 5 Desember 2023.
- Kompas. "KPK Akan Kumpulkan Bukti Temuan PPTAK Terkait Transfer Lukas
Enembe ke Kasino Judi." Kompas.com. Diakses melalui
[https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/09290411/kpk-akan-
kumpulkan-bukti-temuan-ppatk-terkait-transfer-lukas-enembe-ke](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/09290411/kpk-akan-kumpulkan-bukti-temuan-ppatk-terkait-transfer-lukas-enembe-ke) , pada 3
Mei 2023.
- Kowas PPNS Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. "Kedudukan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Diakses melalui
[https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik-
Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf](https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf) pada
10 Agustus 2023.
- Le Nguyen, Chat. "National criminal jurisdiction over transnational financial

crimes”, School of Law, The University of the South Pacific. Diakses melalui

<https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/101217/CLN%20article%203.pdf?sequence=2> pada 31 Mei 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Ketua MK: Putusan MK Turut Menentukan Politik Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional”. Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10310> pada 29 Agustus 2023.

Man, Shuhaimi, “Malaysia Anti-Corruption Commission: Effective Financial Investigation And Anti-Money-Laundering Measures For Confiscation And Asset Recovery To Counter New And Emerging Corruption Threats”, Oktober 2020, hlm 62. Diakses melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/GG13/16_GG13_CP_Malaysia1.pdf, pada 14 November 2023.

Nasution, H,A,M. “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan Mengharuskan Rahasia Bank Wajib Tidak Dirahasiakan”. Diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uangdalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html, pada tanggal 20 November 2023.

Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. “Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” 2019. hlm 2. Diakses melalui <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf> pada 2 Juni 2023.

PPATK. “2 Dekade Gerakan Pemberantasan TPPU : Dukung Transformasi Ekonomi Hijau, PPATK Fokus Berantas Green Financial Crimes,” Siaran Pers PPATK. Diakses melalui https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1181/2-dekade-gerakan-pemberantasan-tppu-dukung-transformasi-ekonomi-hijau-ppatk-fokus-berantas-green-financial-crimes.html pada 8 Maret 2023.

PPATK. “Optimalisasi Pengembalian Aset & Keuangan Negara : PPATK Perkuat Analisis & Pemeriksaan Transaksi Keuangan,” Siaran Pers PPATK. Diakses melalui https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1188/optimalisasi-pengembalian-aset-keuangan-negara-ppatk-perkuat-analisis-pemeriksaan-transaksi-keuangan.html pada 8 Maret 2023.

PPATK. “Memorie Van Toelichting Pembahasan RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Buku Kesatu.” 2011. Diakses melalui http://repository.dpr.go.id/73/1/Memorie_van_toelichting_buku_1.pdf pada 25 Mei 2023.

PPATK. “Memorie Van Toelichting Pembahasan RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Buku Kedua.” 2011. Diakses melalui http://repository.dpr.go.id/74/1/Memorie_van_toelichting_buku2a.pdf pada 25

Mei 2023.

PPATK. “Memorie Van Toelichting Pembahasan RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Buku Ketiga.” 2011. Diakses melalui

http://repositori.dpr.go.id/75/1/Memorie_van_toechlichting_buku3a.pdf pada 25 Mei 2023.

Rachmadsyah, Shanti, “Bagaimana Cara Penyelidikan yang Dilakukan PPATK”. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-penyelidikan-yang-dilakukan-oleh-ppatk-cl3567> pada 22 November 2023

Rafie, Barratut Taqiyyah, “Korupsi Pelindo jadi investigasi bersama Polri-KPK”, Kompas.com, 2016. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/korupsi-pelindo-jadi-investigasi-bersama-polri-kpk> pada 12 Juni 2023.

Saiyar, Octa Dandy. “Gakkum KLHK : Dua Aktor Intelektual Kasus Pembalakan Ilegal Di Mempawah Ditempatkan Sebagai Tersangka,” Gakkum KLHK. Diakses melalui <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/162> pada 11 Maret 2023.

Siahaan, Nikolas Hamonangan. “Keberadaan Kerah Putih dibalik Kasus Pencucian Uang”, Siaran Pers PPATK. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html. Diakses pada 5 Maret 2023.

Siaran Pers Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. “Optimalisasi Pengembalian Aset dan Keuangan Negara ...”. (2022). Diakses melalui <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220415073929.pdf> pada 5 November 2023.

Sumardjono, Maria S.W. “Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”, (Yogyakarta: UGM Press. 2019).

The FATF Methodology on June 2013, “Methodology For Assessing Technical Compliance With The Fatf Recommendations And The Effectiveness Of Aml/Cft Systems”. Diakses melalui <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf.core.download.pdf> pada 25 November 2023.

The FATF Recommendations. “International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation”. National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, (Paris:FATF. 2012-2023).

The General Prosecutor’s Office Republic of Moldova. “Guideline on Conducting Parallel Financial Investigation”, 2019. Hlm 3-69. Diakses melalui https://moldova.iom.int/sites/g/files/tmzbd11626/files/documents/Finanacial_Investigations_guide_en_FINAL.pdf pada 1 Desember 2023.

U.S Departement of State. “Money Laundering and Financial Crime.”2001. Diakses melalui <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2000/959.htm> pada 1 Juni 2023.

